



## **PPPKI: MEMBANGUN KERJASAMA POLITIK UNTUK INDONESIA MERDEKA**

### ***PPPKI: BUILDING POLITICAL COOPERATION FOR INDEPENDENT INDONESIA***

**Nurholisoh<sup>1</sup>, Syariati insan Kamil<sup>2</sup>, Maftuh Ajmain<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: [Ijajiqon@gmail.com](mailto:Ijajiqon@gmail.com)

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 30-04-2025

Revised : 02-05-2025

Accepted : 04-05-2025

Published : 06-05-2025

#### **Abstract**

*This article reviews the role of the Indonesian National Political Association (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) in building political participation towards Indonesian autonomy. Through authentic inquiry. The Indonesian National Political Association Permufakatan is a movement organization founded by Soekarno and dr. Soekiman, on December 17 1927. This article describes how this organization effectively mobilized political power, strengthened solidarity between groups, and fought for Indonesia's autonomy from colonial rule. The method used in this research uses a historical approach in the form of journals, articles, books and newspapers. The essence of this article is the importance of participation between different political groups in achieving common goals. This article also discusses the challenges faced in mobilizing political support for Indonesian autonomy.*

**Keywords: PPPKI, Political participation, Indonesian autonomy**

---

#### **Abstrak**

Artikel ini mengulas peran Persatuan Politik Kebangsaan Indonesia (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) dalam membangun partisipasi politik menuju otonomi Indonesia. Melalui penyelidikan otentik. Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia merupakan organisasi pergerakan yang didirikan oleh Soekarno dan dr. Soekiman, pada 17 Desember 1927. Artikel ini menggambarkan bagaimana organisasi ini secara efektif memobilisasi kekuatan politik, memperkuat solidaritas antar kelompok, dan memperjuangkan otonomi Indonesia dari pemerintahan kolonial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang berbentuk jurnal, artikel, buku dan surat kabar. Inti dari artikel ini adalah pentingnya partisipasi antar kelompok politik yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam memobilisasi dukungan politik untuk otonomi Indonesia.

**Kata Kunci: PPPKI, Partisipasi politik, Otonomi Indonesia**

#### **PENDAHULUAN**

Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang biasa disingkat menjadi ( PPPKI ) Yang didirikan dalam sebuah rapat dibandung pada tanggal 17 Desember 1927, oleh Soekarno dan dr. Soekiman yang dimana beranggotakan oleh PNI, PSI, Budi Utomo, Pasundan, Kaum Betawi , dan lain-lain . Dibentuknya organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dan membangun kerjasama diantara sebagian perhimpunan yang ada ditanah air untuk merapatkan barisan serta menyamakan perjuangan demi menuju kemerdekaan.1 Perhimpunan politik kebangsaan Indonesia ada sebagai bentuk awal yang cukup strategis untuk membangun suatu



kerjasama yang guna merealisasikan kemerdekaan Indonesia. Kerjasama politik yang terjalin dalam organisasi ini sangat lah penting untuk upaya mempersatukan berbagai Politik Guna merealisasikan dalam upaya memerdekakan dari penjajah.

Dikutip dari Wikipedia yang melatarbelakangi lahirnya pemufakatan Perhimpunan Politik kebangsaan Indonesia (PPKI) dikarenakan tokoh-tokoh pergerakan nasional beranggapan bahwa perjuangan melalui masing-masing organisasi tidak membawakan suatu hasil. Kemudian Soekarno mengusulkan suatu gagasan untuk menggabungkan organisasi yang ada agar Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya. Sehingga ketika Soekarno hadir pada kongres partai serikat Islam di Pekalongan, ia menekankan kembali seberapa pentingnya gagasan untuk menyatukan organisasi yang ada agar Indonesia menjadi satu. Akhirnya ditetapkan lah sebuah comite untuk mengajak Berbagai organisasi, kemudian comite tersebut mengundang seluruh pengurus besar pergerakan politik para kaum pribumi.

Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) merupakan sebuah langkah penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Pada masa kolonial, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda yang menekan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi rakyat. Namun, semangat nasionalisme Indonesia mulai tumbuh diawal abad ke-20, seiring dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan politik yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan

Salah satu titik penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan adalah pembentukan PPKI, yang merupakan hasil dari berbagai diskusi dan kesepakatan antara berbagai kelompok politik Indonesia, baik yang berbasis etnis, agama, maupun ideologi. PPKI tidak hanya menjadi wadah untuk mempersatukan berbagai kelompok pergerakan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kerjasama politik yang dapat mengarahkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Kerjasama politik yang terjalin dalam PPKI melibatkan berbagai elemen bangsa yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang beragam. Meskipun demikian, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peran PPKI sangat krusial dalam merumuskan strategi dan taktik untuk mengusir penjajah, termasuk mempersiapkan dasar negara yang nantinya akan menjadi landasan bagi Indonesia sebagai negara merdeka.

PPKI juga menjadi simbol penting dari persatuan nasional, karena perbedaan ideologi dan kepentingan antar kelompok bisa disatukan dalam semangat perjuangan untuk kemerdekaan. Peran PPKI dalam mencapai kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari proses panjang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi sebelumnya, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang juga turut mewarnai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

### **Tinjauan Pustaka**

Konteks Sejarah Gerakan Nasional Pada awal abad ke -20, berbagai organisasi politik di Indonesia mulai menanggapi kebijakan kolonial Belanda yang menekan hak -hak rakyat. Beberapa organisasi yang memainkan peran penting dalam pertempuran nasional adalah Budi Utomo (1908): Organisasi pertama yang mempromosikan kesadaran nasionalisme melalui pendidikan. Sarekat Islam (1911): Dimulai sebagai organisasi ekonomi dan kemudian dikembangkan menjadi gerakan politik. Partai Nasional Indonesia (1927): Didirikan oleh Sukarno dengan visi perjuangan untuk



kemerdekaan di Indonesia. PPPKI merespons sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan persatuan gerakan, mengingat bahwa itu tidak cukup kuat untuk memenuhi kekuatan koloni.

Peran PPPKI dalam memperkuat perjuangan untuk Kemerdekaan PPPKI telah menjadi forum untuk koordinasi di antara organisasi nasionalis dengan beberapa tujuan utama:

1. Menyatukan visi dan strategi perjuangan agar lebih efektif dalam menghadapi kolonialisme.
2. Hindari pembagian antara organisasi nasionalis karena perbedaan dalam ideologi dan minat.
3. Kembangkan rencana aksi politik yang sama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Tantangan dalam Membangun Asosiasi Politik Terlepas dari tujuannya yang mulia, PPPKI menentang beberapa hambatan dalam melaksanakan misinya: Perbedaan ideologis di antara anggota, Islam, Sosialis. Tanggapan kuat dari pemerintah kolonial yang bertujuan membatasi kegiatan organisasi politik. Kurangnya dukungan keuangan dan sumber daya untuk secara efektif memindahkan Organisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu tahapan-tahapan yang di lakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian. Penulis menggunakan pendekatan penelitian sejarah, berbentuk studi literatur yang berupa: jurnal, artikel, buku dan Dan penelitian penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami konteks dinamika dan dampak PPKI pergerakan nasiona. Menurut kuntowijoyo metode penelitian sejarah memiliki empat tahapan yaitu Heuristik, Verifikasi, interpretasi, dan Histiografi.

1. Heuristik merupakan tahapan yang dimana penelitian mencari sumber-sumber yang akan digunakan untuk penelitian baik itu berupa sumber primer ataupun sekunder.
2. Interpretasi merupakan tahapan untuk mengkritisi sumber-sumber yang telah diperoleh penelitian, sumber tersebut dikritisi otentik atau tidak nya sumber tersebut.
3. Verifikasi ialah tahapan dimana penelitian mulai menafsirkan dari sumber- sumber yang telah diperoleh agar memperoleh suatu informasi didalam nya.
4. Histiografi adalah tahapan tersebut akhir yang dimana penelitian mulai merekonstruksi sumber-sumber tersebut untuk dijadikan tulisan sejarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia**

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaannya, yang dimulai dengan perjuangan politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok nasionalis, tokoh-tokoh pejuang, dan organisasi-organisasi politik yang membentuk perhimpunan kebangsaan. Pemufakatan atau kerjasama politik antara berbagai elemen bangsa menjadi bagian penting dari perjalanan menuju Indonesia merdeka. Kerjasama politik ini terjadi melalui serangkaian diskusi, pertemuan, organisasi, dan tindakan kolektif yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Salah satu fondasi utama dalam perjuangan ini adalah pemufakatan antara perhimpunan politik kebangsaan Indonesia.



Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang kolonialisme Belanda, yang berlangsung lebih dari 350 tahun. Sejak awal abad ke-20, kesadaran antar-Indonesia telah muncul dalam kaitannya dengan pentingnya persatuan dan persatuan untuk memerangi kolonialisme. Kaum muda, intelektual, dan gerakan nasional mengakui bahwa Indonesia harus mencapai kemerdekaan, yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama politik yang solid dan terorganisir. Pengakuan ini dikembangkan melalui pengembangan beberapa organisasi yang berusaha

mengintegrasikan semua elemen negara Indonesia. Organisasi -organisasi ini adalah titik pertemuan di mana berbagai ideologi, pandangan politik, dan ide adalah tujuan umum: kemerdekaan Indonesia. Salah satu organisasi yang pertama kali muncul adalah Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan pendidikan, tetapi juga untuk mempromosikan rasa persatuan dan nasionalisme Indonesia. Budi Utomo awalnya terbatas pada kelompok Priyai, tetapi ia menjadi pelopor dalam gerakan nasionalisme Indonesia.

Pada tahun 1911, Sarekat Islam (SI) didirikan sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak Muslim, dengan fokus pada penguatan ekonomi dan sosial sebagai bagian dari pemerintahan kolonial. Sarekat Islam awalnya lebih fokus pada masalah ekonomi, tetapi akhirnya menjadi salah satu organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada 1920 -an, dengan pengembangan nasionalisme, organisasi Asosiasi Indonesia (PI), yang didirikan oleh siswa dari orang Indonesia Belanda, memulai peran yang semakin penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan. PI mengakui bahwa Indonesia tidak hanya dapat mencapai kemandirian melalui perjuangan fisik, ia harus memiliki pemikiran yang kuat, teori, dan diplomasi untuk memperjuangkan dunia internasional Indonesia.

### **Pembentukan dan tujuan PPPKI**

PPPKI didirikan pada 17 Desember 1927 di Bandung oleh beberapa organisasi seperti PNI, PSI, Budi Utomo, Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat Sumatera, dan Indonesische Studieclub. Tujuan utama pendirian PPPKI adalah untuk menggalang persatuan dan kerja sama di antara berbagai perhimpunan di tanah air serta menyamakan arah perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Awalnya, PPPKI berhasil menjalankan fungsinya sebagai wadah pemersatu kalangan pergerakan. Mereka melaksanakan aksi balasan, membentuk dana bantuan nasional, dan mengeluarkan program pengajaran nasional. Namun, seiring waktu, muncul perpecahan di antara anggota-anggota PPPKI. Perbedaan yang semula diabaikan akhirnya tak bisa dihindari. Akibatnya, PPPKI mengalami kemunduran, dan sejak tahun 1935, keberadaannya mulai jarang terdengar dalam dunia pergerakan Indonesia karena tidak ada lagi kegiatan yang dilaksanakan.

Meski mengalami kegagalan sebagai wadah pemersatu, PPPKI telah berhasil menyebarkan paham persatuan di kalangan pergerakan, yang mencapai puncaknya dengan diciptakannya Sumpah Pemuda. Selain itu, PPPKI juga mendorong perhimpunan-perhimpunan lain untuk saling bekerja sama dan bergabung dalam bentuk badan federasi atau fusi. Dengan upaya tersebut, kalangan pergerakan Indonesia semakin menguat dalam melawan penjajahan Belanda.

### **Pentingnya Pemufakatan Dalam perjuangan kemerdekaan**

Perjuangan Kemerdekaan Pemufakatan politik menjadi salah satu kunci utama dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Para tokoh pergerakan nasional memahami bahwa



tanpa adanya kerjasama antar berbagai kelompok dan elemen bangsa, cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak akan terwujud. Perbedaan suku, agama, dan ideologi harus disatukan dalam perjuangan yang sama: mengusir penjajah dan mendirikan negara yang merdeka. Salah satu contoh kerjasama politik yang penting dalam sejarah perjuangan Indonesia adalah pembentukan Indische Partij yang dipimpin oleh Dr.Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Meskipun organisasi ini tidak berlangsung lama, IP berhasil menanamkan kesadaran bahwa Indonesia harus merdeka dan harus dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Kerjasama politik yang lebih luas lagi terjadi ketika berbagai organisasi, baik yang berideologi nasionalis maupun yang berlandaskan agama, menyadari pentingnya membentuk sebuah koalisi yang lebih besar dan lebih terorganisir. Salah satu hasil kerjasama ini adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno pada tahun 1927. PNI menyatukan berbagai elemen yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui jalan politik dan diplomasi.

Kerjasama Politik Antara Kelompok Nasionalis dan Islam Penting untuk dicatat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh kelompok nasionalis. Islam memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, terutama melalui organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Meski ada perbedaan dalam pendekatan politik, kelompok-kelompok ini bersatu dalam semangat perjuangan untuk kemerdekaan. Pada masa itu, terdapat ketegangan antara kelompok nasionalis yang menginginkan Indonesia sebagai negara sekuler dan kelompok Islam yang menginginkan negara yang lebih berlandaskan pada ajaran Islam. Namun, meskipun terdapat perbedaan, mereka sepakat untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Proses ini dapat dilihat dalam peran organisasi Masyumi yang didirikan pada tahun 1945 sebagai gabungan antara organisasi Islam dengan partai-partai politik lainnya. Masyumi turut berperan penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia dan menyuarakan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

Peran Soekarno dan Hatta dalam Membangun Kerjasama Politik Dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan, peran Soekarno dan Hatta sangat krusial. Kedua tokoh ini tidak hanya memiliki visi politik yang besar untuk Indonesia, tetapi juga kemampuan luar biasa dalam menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok yang ada. Soekarno, sebagai pemimpin PNI, mengedepankan perjuangan nasionalis dan semangat persatuan bangsa Indonesia. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno menekankan pentingnya bersatu untuk meraih kemerdekaan dan mengusir penjajah. Sementara itu, Mohammad Hatta, sebagai seorang intelektual dan diplomat, memperkenalkan pentingnya perjuangan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional bagi kemerdekaan Indonesia. Keduanya, dengan dukungan dari berbagai elemen pergerakan, berhasil membawa Indonesia pada momentum besar, yakni proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus 1945.

Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konsolidasi Politik Setelah Indonesia merdeka, salah satu langkah penting yang harus diambil adalah penyusunan dasar negara yang akan membentuk arah pemerintahan Indonesia ke depan. Pada bulan Agustus 1945, tokoh-tokoh pergerakan nasional yang telah membangun kerjasama politik mulai merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan UUD 1945 merupakan langkah penting dalam konsolidasi politik setelah proklamasi kemerdekaan.



UUD 1945, yang dipersiapkan oleh panitia yang terdiri dari tokoh-tokoh dari berbagai kelompok ideologi dan agama, mencerminkan semangat untuk menyatukan beragam pandangan dan nilai dalam satu dasar negara yang inklusif. Undang-undang ini tidak hanya mencakup sistem pemerintahan, tetapi juga prinsip-prinsip dasar mengenai kemerdekaan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, proses penyusunan UUD 1945 berhasil menciptakan konsensus yang mengarah pada terbentuknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

## **KESIMPULAN**

Pemufakatan politik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan bagian integral dari proses pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat. Kerjasama antara berbagai kelompok dan organisasi politik, meskipun penuh dengan perbedaan, akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Proses tersebut melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan kelompok-kelompok politik yang berbeda pandangan, yang mampu menyatukan elemen-elemen bangsa dalam satu tujuan besar: meraih kemerdekaan Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, R. (2004). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia: Dari Pergerakan Nasional Hingga Proklamasi*. Yogyakarta: LkiS.
- Amin, H. (2015). *Politik Nasionalisme Indonesia: Perspektif Sejarah dan Politik*. Bandung: Mizan.
- Barton, G. (2002). *Indonesia's Struggle: Javanese Politics in the 1920s*. Cambridge University Press.
- Crouch, H. (2010). *The Indonesian Elite and Nationalism: Power, Culture and Democracy*.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- MacIntyre, A. (2002). *Indonesia: The Struggle for Unity in Diversity*. Australian National University Press.
- Novita Fitrissia, Skripsi pemufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) tahun 1924-1945, Depok Jawa Barat, Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 1998 jln.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c. 1300*. Palgrave Macmillan.
- Poesponegoro, M. (1997). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Balai Pustaka.
- Soeroso, B. (1983). *Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Southeast Asia Program Publications.
- Sukanto, A. (2000). *Pergerakan Nasional dan Pendirian Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tanuwijaya, A. (2011). *Politik Kerjasama dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Feith, H. (2007). *The Indonesian Revolution and the Constitution, 1945-1950*. Cornell University Press.